



Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, dan SPI Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Imelda Sari^{1*}, Nurlita Malawat², Kanaya Lapae³, Andika Nuraga Budiman⁴

^{1,2,3,4} Accounting, Faculty Economy and Business, YARSI University, Jakarta

Article Info

Article history:

Received : October, 14 2022

Revised : June, 7 2023

Accepted : July, 18 2023

Keywords:

(1) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, (3) Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, (4) Kualitas Laporan Keuangan

Correspondence:

Imelda Sari, YARSI University, Faculty of Economics and Business
imelda.sari@yarsi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, peran Internal Audit, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel Kelurahan pada Kecamatan Cilincing dan terdaftar dalam Sekretariat Kota Administrasi Kota Jakarta Utara. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan teknik kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan peran internal audit dan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Implikasi penelitian ini agar variabel dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penyusun laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan serta dapat membantu bagi para penyusun laporan keuangan menerapkan SAP dan SPI yang memadai.

The Influence of SAP Implementation, Utilization of the Local Government Financial Information System, the Role of Internal Audit, and the Government Performance Accountability Index on the Quality of Financial Reports

Abstract

This study aims to examine the effect of the application of Government Accounting Standards, the use of Regional Financial Accounting Information Systems, the role of Internal Audit, and the Government's Internal Control System on the Quality of Financial Reports. This study uses a sample of Kelurahan in Cilincing District and is registered in the Secretariat of the North Jakarta City Administration. This type of research is quantitative. This study uses primary data by using a questionnaire technique. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results showed that the application of government accounting standards and the use of regional financial accounting information systems had an effect on the quality of financial reports. Meanwhile, the role of internal audit and the government's internal control system has no effect on the quality of financial reports. The implication of this research is that the variables in this study can be taken into consideration by the preparers of financial reports in improving the quality of the reports produced and can help preparers of financial statements apply adequate SAP and SPI

Keywords:

1) Implementation of Government Accounting Standards, (2) Utilization of Regional Financial Accounting Information Systems, (3) the Role of Internal Audit, Government Internal Control Systems, (4) Quality of Financial Reports. Translate in Indonesia

Conflict of interest:

None

JEL Classification :

G23, H83, M40



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) international license

How to cite (APA Style) :

Sari, I., Malawat, N., Lapae, K., Budiman, A. N. (2023). Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, dan SPI Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Journal Accounting, Management and Economics Research (JAMER) 2(1)*, 1-10

DOI : <https://doi.org/10.33476/jamer.v2i1.31>

1. Pendahuluan

Karena tuntutan sosial yang semakin besar akan tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan sistem akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu jenis komitmen, keduanya merupakan alat akuntabilitas bersama untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi suatu organisasi dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini diatur dalam bentuk rekening tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi suatu instansi pemerintah, sehingga pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat diperlukan.

Karakteristik kualitas laporan keuangan tahunan dapat digunakan untuk mencirikan kualitas laporan keuangan tahunan. Karakteristik kualitas laporan keuangan publik yang menjadi persyaratan wajib dalam kerangka konseptual akuntan publik menurut PP No. 71 Tahun 2010, meliputi *comprehensibility*, *konsistensi*, *reliability*, dan *comparability*. Jika informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporannya.

Mahkamah Agung Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai auditor negara, mengevaluasi kualitas laporan tahunan administrasi publik daerah setiap tahun. Atas laporan pemerintah, BPK dapat memberikan empat jenis opini: Non Pribadi (WTP), No Comment (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar (TW), dan No Opinion (TMP). Ketika BPK memberikan LKPD Sertifikat Mutu (WTP), itu berarti laporan tahunan kota disajikan dan diterbitkan secara adil dan berkualitas tinggi. Representasi kewajaran disajikan sebagai opini berdasarkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan pengungkapan yang memadai, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Indriasih, 2014).

Fenomena pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah di Indonesia merupakan topik menarik yang perlu ditelaah lebih lanjut, karena praktik menunjukkan bahwa anomali yang sering ditemukan oleh BPK masih ada. Pemeriksaan BPK menghasilkan 541 LKPD, 485 (90%) LKPD, 50 (9%) LKPD, dan 6 (1%) (TMP) LKPD pada tahun 2019. BPK mengidentifikasi 5.175 kekurangan sistem pengendalian internal (ICS) dalam Ringkasan Hasil Survei Semester I (IHPS I) 2019, di antaranya 1.729 di bidang akuntansi dan pelaporan dan 2.338 di bidang audit. Terdapat 1108 kasus defisiensi struktur pengendalian intern dalam sistem pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Tujuan pemerintah adalah mampu menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Audit internal berdampak pada kualitas laporan keuangan administrasi publik daerah. Badan Pengendalian Intern Pemerintah (SKIP) harus memastikan bahwa semua proses akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Publik, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIK) (SAP). Penyusunan laporan keuangan kualitatif.

Lembaga-lembaga tersebut memerlukan sistem pengendalian internal yang kuat agar dapat melaksanakan administrasi publik dengan sukses. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral yang dihasilkan dari tindakan dan kegiatan yang terus menerus oleh

manajemen dan karyawan untuk memberikan kepercayaan yang cukup untuk operasi yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, perlindungan properti publik, dan pencapaian tujuan perusahaan. Kepatuhan dengan hukum. Kebijakan dan hukum. Undang-undang Sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Kajian Pustaka dan Tinjauan Hipotesis

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Prinsip-prinsip akuntansi, nilai historis, kinerja, bentuk spesifik, periodisitas, pengungkapan penuh yang konsisten, dan penyajian yang wajar termasuk di antara prinsip-prinsip ini. Komite Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Prinsip Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Widya Lutfi Wibowo, Suharno, dan Bambang Widarno (2020), serta Meisy Hendri dan Erinos NR (2020), menemukan bahwa penerapan standar akuntansi meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan standar pelaporan, semakin besar dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian ini, asumsi berikut dapat dibuat:

H1: Penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Nurmalia Hasanah (2016:195) mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut: "Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi manual dan terkomputerisasi yang mencatat transaksi keuangan daerah dalam rangka meminta pertanggungjawaban masyarakat atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, antara lain." Anggaran untuk keuangan daerah. Penelitian Lestari & Dewi (2020), Dewi et al., (2017) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi berdampak positif terhadap kualitas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika keseluruhan sistem terintegrasi dengan baik maka sistem informasi juga akan berkembang. Oleh karena itu, semakin baik sistem informasi akuntansi, semakin baik kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian ini, asumsi berikut dapat dibuat:

H2: Penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas akuntansi

Internal Audit

Audit internal merupakan kegiatan independen dan objektif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan kinerja organisasi atau bisnis, menurut Association of Internal Auditors (IIA). Badan Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah/Kota melakukan Audit Intern Pemerintah sesuai dengan PP. 60 Tahun 2008, yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Peran audit internal, menurut PP no. 60 Tahun 2008, meliputi proses kegiatan pemantauan atau pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta kegiatan analisis, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian lainnya. Handayani & Rispantyo (2020) dan Hasanah et al., (2019) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar peran audit internal, maka semakin besar pula dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern adalah suatu kesatuan proses tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh pegawai untuk menjamin keamanan, efisiensi, dan kecukupan organisasi (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang komprehensif yang digunakan oleh pemerintah federal dan negara bagian. Penelitian oleh Rahmawati et al., (2018), Addinul Yaqin & Jatmiko (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin besar dampaknya terhadap kualitas situasi keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H4: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

3. Data and Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, dan Kecamatan Koja yang berada pada Sekretariat Kota Administrasi Kota Jakarta Utara. Pemilihan sampel pada pertimbangan bahwa pegawai bagian keuangan atau bagian akuntansi di setiap Kelurahan. Sampel pada penelitian ini adalah 16 kelurahan yang berada pada Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, dan Kecamatan Koja yang terdaftar di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan jumlah responden sebanyak 45 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

4. Hasil

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Ketika pertanyaan pada kuesioner dapat diukur dengan apa yang diukur kuesioner tersebut kemudian dianggap valid. Dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel, kita dapat melakukannya dapat menentukan apakah itu valid atau tidak. Jika angka r lebih besar dari tabel r , kueri valid. Untuk menentukan nilai tabel r , terlebih dahulu hitung nilai derajat kebebasan (degrees of freedom). Menggunakan rumus $df = n - 2$, dimana n adalah jumlah responden pengujian reliabilitas. Yang diketahui Jumlah responden dalam penelitian ini adalah $n = 45$, jadi $df = 45 - 2 = 43$. Nilai tabulasi $r = 43$ derajat kebebasan adalah 0,2483.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	R tabel ($n = 45$)	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0.711	0.2483	Valid
	Y2	0.703	0.2483	Valid
	Y3	0.749	0.2483	Valid
	Y4	0.726	0.2483	Valid
	Y5	0.702	0.2483	Valid
	Y6	0.541	0.2483	Valid
	Y7	0.591	0.2483	Valid
	Y8	0.737	0.2483	Valid
	Y9	0.771	0.2483	Valid
	Y10	0.825	0.2483	Valid
	Y11	0.757	0.2483	Valid
	Y12	0.642	0.2483	Valid
	Y13	0.694	0.2483	Valid
	Y14	0.659	0.2483	Valid

	Y15	0.615	0.2483	Valid
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	X1	0.637	0.2483	Valid
	X2	0.298	0.2483	Valid
	X3	0.437	0.2483	Valid
	X4	0.391	0.2483	Valid
	X5	0.363	0.2483	Valid
	X6	0.600	0.2483	Valid
	X7	0.509	0.2483	Valid
	X8	0.656	0.2483	Valid
	X9	0.431	0.2483	Valid
	X10	0.586	0.2483	Valid
	X11	0.667	0.2483	Valid
	X12	0.716	0.2483	Valid
	X13	0.406	0.2483	Valid
	X14	0.506	0.2483	Valid
	X15	0.665	0.2483	Valid
	X16	0.435	0.2483	Valid
	X17	0.347	0.2483	Valid
	X18	0.340	0.2483	Valid
	X19	0.320	0.2483	Valid
	X20	0.368	0.2483	Valid
	X21	0.453	0.2483	Valid
	X22	0.646	0.2483	Valid
	X23	0.533	0.2483	Valid
	X24	0.533	0.2483	Valid
	X25	0.678	0.2483	Valid
	X26	0.489	0.2483	Valid
	X27	0.534	0.2483	Valid
	X28	0.380	0.2483	Valid
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	X1	0.896	0.2483	Valid
	X2	0.880	0.2483	Valid
	X3	0.927	0.2483	Valid
Peran Internal Audit (X3)	X1	0.763	0.2483	Valid
	X2	0.791	0.2483	Valid
	X3	0.669	0.2483	Valid
	X4	0.818	0.2483	Valid
	X5	0.703	0.2483	Valid
	X6	0.550	0.2483	Valid
	X7	0.806	0.2483	Valid
	X8	0.878	0.2483	Valid
	X9	0.800	0.2483	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X4)	X1	0.721	0.2483	Valid
	X2	0.589	0.2483	Valid
	X3	0.899	0.2483	Valid
	X4	0.871	0.2483	Valid
	X5	0.889	0.2483	Valid
	X6	0.852	0.2483	Valid
	X7	0.787	0.2483	Valid
	X8	0.868	0.2483	Valid
	X9	0.817	0.2483	Valid

Sumber : data diolah (2021)

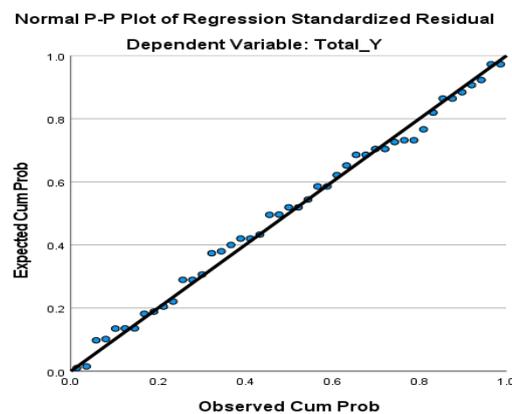
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha Cronbach
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.923
Penerapan SAP (X1)	0.882
Pemanfaatan SIAKD (X2)	0.884
Peran Internal Audit (X3)	0.902
SPIP (X4)	0.936

Sumber : data diolah (2021)

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Karena semua data tersebar di sekitar garis diagonal, maka hasil dari uji normalitas membuktikan bahwa semua data yang ada berdistribusi dengan normal (lihat Gambar 1). Hasilnya, data dapat disimpulkan memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : data diolah (2021)

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**Uji Multikolinearitas**

Pada hasil uji multikolinearitas pada tabel 3, menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, artinya terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

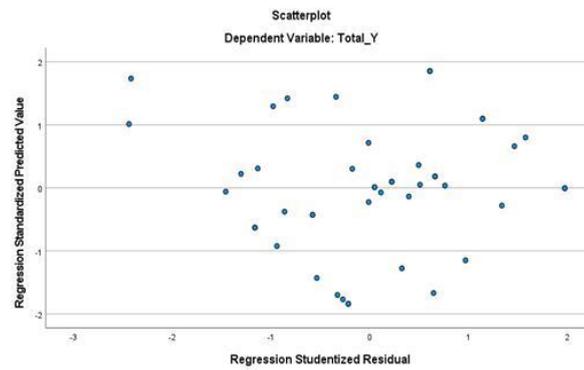
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Tolerance	VIF
Penerapan SAP	.947	1.056
Pemanfaatan SIAKD	.425	2.352
Peran Internal Audit	.448	2.233
SPIP	.403	2.484

Sumber : data diolah (2021)

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik gambar tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, bukan mengikuti pola yang teratur. Model regresi tidak memiliki heteroskedastisitas.



Sumber : data diolah (2021)

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi akan menyatakan hubungan linear di antara dua variabel atau lebih. Berikut ini merupakan hasil dari uji regresi linier berganda:

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	1	(Constant)	15.516			14.447
	Penerapan SAP	.226	.105	.276	2.153	.037
	Pemanfaatan SIAKD	2.335	.768	.581	3.041	.004
	Peran Internal Audit	.503	.297	.316	1.694	.098
	SPIP	-.717	.277	-.509	-2.593	.013

Sumber : data diolah (2021)

Uji Hipotesis

Nilai R² pada tabel 5 adalah 0,379 yang artinya 37,9% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi empat variabel bebas terkait. Sisanya 62,1% diwakili oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.615 ^a	.379	.317	4.303

Sumber : data diolah (2021)

Uji T

Berdasarkan pada tabel 6 dibawah ini dapat diketahui bahwa H1 dan H2 diterima, sedangkan H3 dan H4 ditolak. Pada t tabel mendapatkan nilai sebesar 2.021, nilai tersebut didapatkan dengan cara $t_{table} = t(\alpha/2; n-k-1)$ yang artinya $t_{table} = t(0,05/2; 45-4-1) = (0,025; 40)$.

Tabel 6. Hasil Uji T

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.516	14.447		1.074	.289
Penerapan SAP	.226	.105	.276	2.153	.037
Pemanfaatan SIAKD	2.335	.768	.581	3.041	.004
Peran Internal Audit	.503	.297	.316	1.694	.098
SPIP	-.717	.277	-.509	-2.593	.013

Sumber : data diolah (2021)

5. Diskusi

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai t untuk penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan kreditur sebesar 2,153 dan nilai t untuk derajat liberalitas sebesar 2,0. Ini memiliki efek positif pada nilai probabilitas. Ini adalah 0,037, yang lebih kecil dari 0,05 maka H1 yang diterima. Penerapan Standar Akuntansi Pertanggungjawaban 2015. Nomor 71 Tahun 2001 tentang Standar Akuntansi Publik dan Peraturan Sekretariat Dalam Negeri. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Kepada Masyarakat Untuk Memungkinkan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Secara Kualitatif.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas penutupan dengan nilai t hitung sebesar 3,041, sedangkan diperoleh t tabel dengan derajat kebebasan sebesar 2,021. Nilai probabilitas 0,004 lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima. Penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, seperti sistem anggaran, sistem pembelian tunai dan sistem pembayaran tunai yang dilaksanakan oleh Sekretariat Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara telah diterapkan di Azerbaijan. Penyusunan laporan keuangan secara berkala dan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi negara, dan pemahaman staf fasilitas tentang sistem informasi akuntansi dapat memberikan ekstrak produk akhir berkualitas tinggi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi, termasuk teknologi informasi, internet dan teknologi komunikasi, akan meningkatkan pengolahan data transaksi, akurasi dan ketepatan waktu laporan keuangan, serta menjamin nilai dan keandalan data yang dihasilkan. bahwa informasi dalam pernyataan sponsor dapat diandalkan dan bahwa informasi tersebut tersedia bagi pengambil keputusan saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut menjadi tidak relevan dengan pengambilan keputusan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai t-hitung sebesar 1,694, t-tabel dengan derajat kebebasan sebesar 2,021, dan nilai probabilitas sebesar 0,98. lebih besar dari 0,05, H3 dihilangkan. Sekretariat Pemerintah Kota Jakarta Utara memiliki jumlah petugas pemeriksaan yang terbatas, tingkat keahlian yang tinggi dan jangkauan pemeriksaan yang luas. Oleh karena itu, penelaahan yang menyeluruh dan lengkap terhadap semua laporan keuangan

merupakan kendala lain, yang mengakibatkan kinerja audit internal yang kurang optimal dan menghasilkan laporan keuangan yang kurang berbobot.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan ketika nilai t-score (-2,593) dan nilai t-tabel (2,021) adalah derajat kebebasan. Dan nilai probabilitas 0,013 lebih kecil dari 0,05, sehingga H4 dibuang. Sekretariat Kota Jakarta Utara telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Negara. Pengendalian internal atas operasi perusahaan telah diperkenalkan, tetapi hal ini belum berdampak efektif pada kualitas pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan lemahnya pimpinan lembaga yang tidak dapat mengelola sistem pengendalian intern secara optimal.

6. Kesimpulan

Penerapan Standar Akuntansi Negara berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sejak tahun 2015, Sekretariat Kota Jakarta Utara menggunakan Standar Akuntansi Negara berdasarkan komitmen, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 33. 71 Standar Akuntansi Negara 2001 Sistem Informasi Keuangan Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas akhir. Memberikan visibilitas ke dalam sistem informasi akuntansi oleh personel perangkat untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, serta ruang lingkup audit, masih menjadi kendala bagi pelaksanaan audit yang komprehensif dan komprehensif. Apa yang menggebu-gebu pekerjaan audit internal juga kurang optimal dan mengarah pada audit keuangan yang kurang optimal. pernyataan. Kualitas buruk. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan. Kontrol internal. operasional perusahaan namun belum berdampak efektif terhadap kualitas laporan keuangan. Implikasi penelitian ini agar variabel dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penyusun laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan serta dapat membantu bagi para penyusun laporan keuangan menerapkan SAP dan SPI yang memadai.

Daftar Pustaka

- Yaqin, Addinul., & Jatmiko, Bambang. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/rab.020116>
- Rahmawati, Astika., Mustika, I Wayan., & Eka, Lilik Handaya. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 20(2). <https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1097>
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriasih, Dewi. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20).

- Purwanti, Meilani., & Wasman. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/ess.v4i3.2434>
- Hendri, Meisy., & Erinoss, N. R. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.224>
- Dewi, N. L. A. P., Kurniawan, P. S., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis SAK-ETAP, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng). *JIMAT Undiksha*, 8(2).
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. R. S. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2). <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Hasanah, Nurmalia., & Fauzi, Achmad. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: IN MEDIA.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang System Pengendalian Internal. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Handayani, Putri Nur., & Rispanty, Sunarti. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Opd Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3). <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4435>
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Wibowo, Widya Lutfi., Suharno., & Widarno, Bambang. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. *Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1). <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4415>
- Hasanah, Yasma Amila., Sasongko, Noer., & Bawon, A. D. B. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). *Urecol*, 9(5).